

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Manifes Kebudayaan merupakan sebuah pernyataan cita-cita kebudayaan yang lahir sebagai reaksi atas Lekra. Manifes Kebudayaan lahir karena kebebasan mencipta terganggu. Hal ini disebabkan adanya tekanan dari Lekra yang pada masa itu menguasai kehidupan kesenian dan kesusastraan Indonesia. Lekra secara ofensif mempropagandakan semboyan “seni untuk rakyat” dan slogan “politik sebagai panglima”. Semboyan “politik sebagai panglima” ini mempunyai pengertian bahwa kepentingan partai di atas segalanya, termasuk juga sastra.

Tekanan yang dilakukan Lekra dalam kehidupan kesenian dan kesusastraan ini membuat para sastrawan di luar Lekra juga membentuk organisasi-organisasi kebudayaan yang berlandung pada partai politik tertentu untuk dapat bertahan. Beberapa seniman dan sastrawan yang tidak ingin menyangkutpautkan hasil karyanya dengan politik kemudian membuat sebuah pernyataan bersama, yaitu Manifes Kebudayaan.

Manifes Kebudayaan lahir melewati proses yang cukup panjang. Sebelum menjadi sebuah naskah Manifes Kebudayaan yang disahkan oleh para manifestan dan disebarluaskan di berbagai media, penciptaan naskah Manifes Kebudayaan ini melalui proses pematangan isi naskah terlebih dahulu. Naskah ini pertama kali ditulis rancangannya oleh Wiratmo Soekito. Setelah itu, ia memberikan naskah tersebut kepada Goenawan Mohamad dan Bokor Hutasuhut untuk dibicarakan dengan seniman dan sastrawan lain. Kemudian, 13 seniman dan sastrawan bertemu untuk membahas naskah tersebut. Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa naskah Manifes Kebudayaan tersebut dapat diterima sebagai bahan dasar yang perlu diperinci dan disederhanakan. Di dalam pertemuan tersebut juga diputuskan pembentukan panitia perumus naskah Manifes Kebudayaan. Setelah naskah Manifes Kebudayaan kembali dirumuskan, tanggal 24 Agustus 1963 Manifes Kebudayaan disahkan dan ditandatangani oleh 22 orang seniman dan sastrawan Indonesia.

Ada beberapa perbedaan antara rancangan naskah Manifes Kebudayaan dan naskah yang disahkan. Pada naskah yang telah disahkan, isi penjelasan-penjelasan tersebut lebih ringkas daripada rancangannya. Selain itu, di bagian penjelasan naskah Manifes Kebudayaan yang telah

disahkan juga tidak ada kalimat-kalimat yang berupa kritik tajam seperti yang ada di dalam rancangan.

Pernyataan bahwa naskah Manifes Kebudayaan tersebut mengumumkan lahirnya sebuah angkatan baru, yaitu angkatan perlawanan nasional juga tidak disebutkan dalam naskah Manifes Kebudayaan yang telah disahkan. Tampaknya naskah yang telah disahkan tersebut berusaha mengurangi pernyataan-pernyataan yang cenderung terdengar keras untuk menghindari adanya perselisihan.

Dalam naskah Manifes Kebudayaan kita dapat melihat cita-cita kebudayaan yang diinginkan manifestan. Ada empat hal yang menjadi inti Manifes Kebudayaan.

Pertama, manifestan menyatakan bahwa mereka menolak adanya subordinasi bidang kebudayaan. Hal ini terkait oleh adanya semboyan “politik adalah panglima” yang dijalankan dan disebarluaskan Lekra pada masa itu.

Kedua, manifestan menyatakan dengan tegas bahwa mereka menolak semboyan “politik di atas estetika” dan “estetika di atas seni”. Menurut mereka, semboyan “politik di atas estetika” mengakibatkan karya sastra hanya dijadikan sebagai alat oleh para politisi untuk membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, manifestan mengambil sikap sendiri. Mereka tidak setuju semboyan “politik di atas estetika” dan “estetika di atas seni”. Mereka mengambil suatu paham yang tidak mengorbankan estetika bagi politik dan juga tidak mengorbankan politik bagi estetika.

Ketiga, manifestan juga menolak semboyan “*the end justifies the means*”. Menurut mereka, semboyan “tujuan menghalalkan cara” tersebut tidak sesuai dengan Pancasila. “*The end justifies the means*” merupakan semboyan Lekra. Menurut mereka semboyan tersebut akan menciptakan karya-karya di bidang kebudayaan yang bersifat propaganda semata. Hal ini disebabkan semboyan tersebut lebih mementingkan tujuan daripada cara yang digunakan.

Keempat, manifestan mengatakan setuju dengan konsep humanisme universal. Namun, humanisme universal yang mereka setuju bersyarat. Humanisme universal tersebut harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi dan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah reaksi atas sikap Lekra, lahirnya Manifes Kebudayaan tentunya juga mendapat reaksi yang begitu besar dari masyarakat, khususnya seniman, sastrawan dan organisasi-organisasi kebudayaan. Reaksi ini ada yang berupa dukungan dan juga berupa penolakan. Dari berbagai artikel yang menyatakan penolakan dan kecaman terhadap Manifes

Kebudayaan dan pendukungnya, setidaknya ada enam hal yang membuat mereka menyatakan penolakannya, yakni Manifes Kebudayaan menganut humanisme universal, anti-Manifesto Politik, menolak "politik sebagai panglima", menolak semboyan "tujuan menghalalkan cara", anti-Nasakom, dan bersikap ragu-ragu terhadap revolusi.

Penyerangan yang dilakukan tidak hanya terkait dengan ideologi para manifestan yang tertuang dalam naskah Manifes Kebudayaan. Mereka juga menyerang individu-individu pendukung Manifes Kebudayaan, terutama konseptor dan penandatangan naskah Manifes Kebudayaan. Penyerangan terhadap individu para manifestan bahkan lebih gencar dilakukan daripada memperdebatkan ideologi Manifes Kebudayaan sendiri.

Manifes Kebudayaan pun juga menyerang kembali Lekra dengan mengatakan bahwa Lekra anti-Manipol. Hal ini memperlihatkan bahwa kedua golongan tersebut mencoba mempertentangkan ideologi lawannya dengan ajaran Presiden Soekarno. Mereka berlomba-lomba mencari dukungan dari Soekarno dengan mencoba mengungkapkan dukungannya terhadap ajaran-ajarannya, seperti Manipol-USDEK. Walaupun manifestan juga menyerang kembali Lekra, bahasa yang digunakan tetap santun yang menunjukkan sikap humanis mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa para manifestan tampaknya menerapkan paham humanisme universalnya ke dalam kehidupan nyata.

Puncaknya yaitu pelarangan Manifes Kebudayaan oleh Presiden Soekarno pada 8 Mei 1964. Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan karena dianggap Manifes Kebudayaan menandingi Manifesto Politik dan melemahkan revolusi. Pelarangan Manifes Kebudayaan ini tentunya berpengaruh terhadap situasi kepengarangan kesusastraan Indonesia. Kebebasan kreatif yang menjadi cita-cita para manifestan akhirnya gagal untuk diwujudkan pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa politik memang telah menjadi panglima.

Dilarangnya Manifes Kebudayaan membuat Lekra dan kawan-kawannya semakin leluasa untuk bergerak di bidang kesenian dan kesusastraan. Para penandatangan dan pendukung Manifes Kebudayaan "diganyang". Kesusastraan Indonesia pun akhirnya diwarnai oleh karya-karya sastrawan Lekra. Karya-karya tersebut bernafaskan revolusi dan terus-menerus berbicara tentang rakyat. Rakyat yang dimaksud dalam hal ini adalah buruh dan petani yang telah menjadi soko guru PKI. Hal ini memperlihatkan bahwa kebebasan mencipta dan berkreasi dalam kesusastraan Indonesia dikalahkan atas nama kepentingan politik.

6.2 Saran

Dari peristiwa Manifes Kebudayaan tersebut kita dapat melihat hubungan antara politik, ideologi, dan kebudayaan termasuk juga kesusastraan. Pengaruh politik sangat besar terhadap kehidupan kesusastraan dan kebudayaan. Politik benar-benar telah menjadi panglima pada masa itu. Keadaan semacam itu jelas tidak menguntungkan dan tidak sehat bagi kemajuan kesenian, kesusastraan, dan kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, peristiwa Manifes Kebudayaan mengajak kita untuk belajar dari sejarah. Jangan sampai kehidupan kebudayaan, khususnya kesusastraan Indonesia mengalami masa seperti itu, yaitu kebebasan mencipta dan berkreasi dikalahkan atas nama kepentingan politik. Keteguhan para manifestan untuk memperjuangkan kebebasan dalam berkarya juga patut dijadikan sebuah pembelajaran.

Selain itu, dari peristiwa tersebut kita juga dapat melihat bahwa penguasa begitu besar pengaruhnya terhadap kesusastraan Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno, para manifestan mendapat tekanan yang begitu besar. Karya-karya mereka dilarang terbit dan dibakar. Demikian pula sebaliknya ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa. Pada pemerintahan Presiden Soeharto, pihak Lekra-lah yang ditekan. Para seniman dan sastrawan dipenjara, seperti Pramoedya Ananta Toer. Karya-karyanya pun dilarang terbit dan dibakar. Begitu disayangkan bila karya-karya sastra mereka yang merupakan bagian dari kesusastraan Indonesia hilang begitu saja. Melihat hal tersebut, sudah saatnya kini karya-karya para sastrawan yang pada waktu itu dilarang diterbitkan kembali. Hal ini tentunya dapat melengkapi bagian yang sempat hilang dalam kesusastraan Indonesia.